

## **BAB II DISINTEGRASI YUGOSLAVIA**

### **A. Bubarnya Federasi Komunis Yugoslavia**

Hampir satu abad, Yugoslavia mampu mempertahankan kesatuannya sebagai sebuah pemerintahan yang mencakup negara-negara Slavia Selatan. Kesepakatan yang diambil negara-negara Slavia Selatan untuk bersatu telah memberikan warna tersendiri bagi perjalanan sejarah negara-negara tersebut. Sebelumnya negara-negara yang terletak di sebelah tenggara Eropa ini merupakan negara yang terpisah-pisah dengan pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing negara bagian. Bersatunya negara-negara Slavia Selatan ini merupakan keputusan yang cukup berani, mengingat negara-negara tersebut memiliki etnis yang beragam. Mereka telah terbiasa dalam pergaulan dengan nasionalisme etnis masing-masing yang mereka agungkan, maka bukan suatu hal yang mustahil jika pada akhirnya Yugoslavia kembali terpecah menjadi beberapa negara. Beberapa hal yang menyebabkan disintegrasi Yugoslavia antara lain sebagai berikut.

#### **1. Konflik Etnis**

Jiwa bangsa-bangsa Balkan memang terkenal dengan sifat keras dan gemar berperang. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan masing-masing kelompok bangsa Slavia Selatan yang dapat dirunut dari sejarahnya. Nenek moyang bangsa-bangsa Slavia Selatan yang terdiri dari Serbia, Kroasia, dan Slovenia, masing-masing membentuk satu sistem kenegaraan di bawah seorang pemimpin perang. Bangsa-bangsa tersebut hidup dalam suasana perang yang tak pernah padam. Bahkan, pada era-era selanjutnya wilayah Semenanjung Balkan

tetap menjadi ajang adu kekuatan oleh kekuasaan-kekuasaan besar di Eropa. Tak heran jika pada akhirnya, bangsa-bangsa Slavia Selatan mewarisi sifat leluhur mereka yang begitu akrab dengan peperangan.

Sifat keras yang menjadi ciri khas negara-negara Balkan melekat paling erat pada etnis Serbia. Sejak Balkan dikuasai Turki Usmani, Serbia terlihat paling gencar melakukan perlawanan. Apabila Serbia berhasil mengalahkan Turki, bangsa-bangsa Slavia Selatan akan dengan mudah dipersatukan oleh Serbia. Serbia memiliki semangat nasionalisme yang begitu tinggi untuk menyatukan bangsa-bangsa Slavia Selatan semenjak dikumandangkannya Pan Slavisme<sup>1</sup>. Setelah bangsa-bangsa Slavia Selatan tergabung dalam kerajaan Yugoslavia sifat keras itu tidak pernah luntur. Terlihat dari eksistensi Serbia yang begitu besar dalam federasi yang dibangun bersama negara-negara Slavia Selatan tersebut. Serbia menerapkan sistem sentralisasi dalam pemerintahan kerajaan.

Sejak awal berdirinya kerajaan Yugoslavia, telah ditandai dengan berbagai percekocokan, terutama antara Kroasia dan Serbia.<sup>2</sup> Tahta kerajaan Yugoslavia yang dipegang oleh Aleksander Karadjorjevic, menerapkan sistem sentralisasi dalam konstitusi kerajaan. Konstitusi tersebut rupanya tidak disetujui oleh

---

<sup>1</sup> Gerakan Pan Slavisme dikumandangkan sejak 1848. Gerakan ini ditujukan untuk mempersatukan bangsa-bangsa Slavia dan menjunjung tinggi kebudayaan Slavia. Gerakan ini diprakarsai oleh Rusia, Polandia, dan Serbia. Serbia mendapat pengaruh Pan Slavisme dari Rusia yang hendak meluaskan pengaruhnya di Balkan. Marwati Djoened Poesponegoro, *Tokoh dan Peristiwa dalam Sejarah Eropa 1815-1945*, (Jakarta:Erlangga, 1982), hlm. 190.

<sup>2</sup> Tjipta Lesmana, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, (Jakarta: Erwin-Rika Press, 1992), hlm. 190.

Kroasia, terutama oleh Partai Tani Kroasia<sup>3</sup>. Kroasia menginginkan otonomi yang lebih longgar dalam konstitusi kerajaan, namun keinginan tersebut ditolak oleh Serbia dengan berbagai alasan. Silang pendapat antara dua negara bagian ini segera menyulut pertikaian antara Kroasia dan Slovenia dengan Serbia dan Montenegro yang mendapat dukungan Muslim Bosnia.

Pertikaian antara Serbia dengan Kroasia kembali memuncak ketika terjadi pembunuhan tiga pimpinan Partai Tani Kroasia pada tanggal 20 Juni 1928.<sup>4</sup> Kemarahan Kroasia semakin berkobar akibat peristiwa ini. Kekuatan fasis yang menguasai Yugoslavia sejak tahun 1941, memanfaatkan perselisihan yang terjadi. Bosnia dimasukkan ke dalam negara Kroasia dan Islam dinyatakan sebagai agama resmi Kroasia.<sup>5</sup> Kroasia didukung fasis membentuk *Ustasha*<sup>6</sup> dan kaum Muslim Bosnia bergabung dalam organisasi ini. Bahkan fasis mendirikan Negara Independen Kroasia<sup>7</sup> (NDH) yang diproklamkan pada tanggal 10 April 1941.<sup>8</sup>

Ante Pavelic mengorganisir *Ustasha* untuk memusnahkan etnis Serbia di Kroasia serta di Bosnia. Sekitar 600.000 orang Serbia tewas dalam pembantaian

---

<sup>3</sup> Partai Tani Kroasia merupakan partai oposisi di Kroasia yang didirikan pada tahun 1904. *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>5</sup> Dafri, *Konflik Etnik Pasca Perang Dingin: Studi Kasus Yugoslavia*, (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hlm. 24.

<sup>6</sup> *Ustasha* merupakan gerakan teroris dan nasionalis ekstrim yang dipimpin oleh Ante Pavelic serta menjadi kekuatan dalam NDH. Noel Malcolm, *Bosnia A Short History*, (London: Papermac, 1996), hlm. 321.

<sup>7</sup> Negara Independent Kroasia adalah negara boneka bentukan Jerman, wilayahnya meliputi Kroasia dan Bosnia sejak tahun 1941-1945. *Ibid.*, 320.

<sup>8</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 196.

yang dilakukan oleh Ustasha. Pembantaian tersebut menyisakan duka mendalam bagi etnis Serbia dan peristiwa yang merenggut banyak nyawa orang Serbia ini tentu tidak dapat dilupakan begitu saja. Dendam pasti terbesit dalam benak Serbia yang entah kapan dendam itu akan terbalaskan.

Tragedi pembantaian terhadap Serbia mulai mereda seiring munculnya kaum komunis. Komunis yang selalu berseberangan dengan fasis menjadi salah satu oposisi cukup kuat di Kroasia. Masa komunis Kroasia berhasil dikerahkan Tito sebagai pasukan Partisan yang akhirnya mampu mengalahkan kekuatan fasis. Semenjak fasis berhasil dikalahkan oleh Tito, yang notabennya adalah orang Kroasia, harapan Serbia untuk segera meluapkan dendam terhadap Kroasia tampaknya akan sulit diwujudkan. Palsunya, meski Serbia pernah dibantai oleh Kroasia, di sisi lain Kroasia juga telah melepaskan Yugoslavia dari cengkeraman fasis. Serbia pun terhanyut ke dalam suatu dilema. Selain menyimpan dendam, Serbia juga berhutang budi terhadap Kroasia lantaran perlawanan yang dilakukan Serbia terhadap fasis di bawah pimpinan Draza Mihailovic mengalami kegagalan dalam mengusir kekuatan fasis. Barangkali hal inilah yang kemudian mengalihkan sasaran balas dendam Serbia menjadi ditujukan kepada Muslim Bosnia.

Pembantaian yang dilakukan Ustasha terhadap etnis Serbia bukanlah satu-satunya konflik etnis yang terjadi di Yugoslavia. Kerusuhan antar etnis juga terjadi antara minoritas etnis Serbia dengan etnis Albania di Kosovo<sup>9</sup>. Semula, Kosovo merupakan bagian dari Republik Serbia, namun mayoritas penduduk

---

<sup>9</sup> Tito memperkecil wilayah Serbia dengan membentuk dua provinsi otonom yaitu Vojvodina dan Kosovo. Tindakan tersebut merupakan jalan keluar yang diambil Tito terkait keinginan Serbia untuk menggabungkan wilayah Bosnia yang dihuni etnis Serbia ke dalam wilayah Republik Serbia. *Ibid.*

Kosovo adalah etnis Albania. Penguasa Turki Usmani pada abad ke-17 memindahkan penduduk Muslim Albania ke Kosovo guna menekan perkembangan Kristen Ortodoks yang kebanyakan dianut etnis Serbia. Akibatnya etnis Serbia di Kosovo selalu merasa terdeskreditkan.

Etnis Albania di Kosovo terlihat mulai memiliki keberanian untuk memusuhi etnis Serbia semenjak Aleksandar Rankovic<sup>10</sup> tidak lagi mengayomi etnis Serbia di Kosovo. Sengketa semakin menajam dengan adanya diskriminasi politik yang dialami etnis Serbia. Etnis Serbia tidak terima dengan adanya pencopotan birokrat Serbia di Kosovo oleh orang-orang keturunan Albania. Rivalitas antara keduanya senantiasa terpelihara hingga menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Sejak 1970, Kosovo tidak pernah berhenti dari pergolakan rasial, bentrokan antara Albania dengan Serbia sering terjadi. Setelah kerusuhan yang cukup besar terjadi pada tahun 1968, kerusuhan dengan intensitas lebih besar meletus pada tahun 1981. Bulan April tahun 1981, terjadi demonstrasi etnis Albania memprotes kebijakan ekonomi Beograd yang diwarnai sentimen anti Serbia.<sup>11</sup> Pemerintah federal berusaha memadamkan demonstrasi tersebut dengan cara kekerasan. Akibatnya, puluhan korban berjatuhan dalam peristiwa ini.

---

<sup>10</sup> Aleksandar Rankovic adalah pemimpin Partai Komunis Yugoslavia pada tahun 1927. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Direktur Militer, dan polisi Rahasia. Ia dianggap sebagai orang yang kekuasaannya langsung di bawah Tito. Tahun 1966, Tito memecat Rankovic dari jabatan wakil presiden karena menentang kebijakan liberalisasi yang dijalankan. Milovan Djilas, *Percakapan dengan Stalin*, a.b. Saini K. M., (Bandung: Kiwari, 1963), hlm 275.

<sup>11</sup> Syamsul Hadi, *Politik Standar Ganda Amerika Serikat Terhadap Bosnia*, (Jakarta: FoDis, 1997), hlm. 36.

Kerusuhan yang terjadi di Kosovo merupakan masalah krusial yang perlu diwaspadai, karena memberikan dampak yang luas terhadap kelangsungan politik Yugoslavia. Situasi politik Yugoslavia semakin tidak stabil seiring munculnya Slobodan Milosevic<sup>12</sup>. Peliknya permasalahan yang melanda Kosovo dimanfaatkan Milosevic untuk mengambil langkah dalam mencapai puncak karir politiknya.

Sejak terpilih sebagai ketua Liga Komunis Serbia pada September 1987, Milosevic menggunakan retorika nasionalisme etnis Serbia untuk memobilisasi massa pendukungnya sehingga dapat menggeser para pejabat yang terlalu moderat dalam menangani masalah Kosovo. Melalui revolusi antibirokratik tersebut, Milosevic berjanji akan memenuhi harapan sosial dan kebangsaan etnis Serbia dengan menegaskan jaminan terhadap integritas Serbia sebagai sebuah bangsa yang mampu menyejahterakan perekonomian rakyat.<sup>13</sup>

Tampak jelas bahwa Milosevic berusaha menggantikan nasionalisme Yugoslavia yang didasarkan atas prinsip *brotherhood and unity* menjadi nasionalisme yang hanya didasarkan atas persamaan etnis yaitu etnis Serbia. Mengingat Yugoslavia adalah negara yang sangat multi etnis, cara tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan memunculkan kecemburuan dari etnis lain. Ancaman terhadap integritas Yugoslavia semakin terlihat dengan adanya keterlibatan Kroasia dan Slovenia yang menentang kebijakan Milosevic.

---

<sup>12</sup> Slobodan Milosevic lahir pada tanggal 20 Agustus 1941 di Pozavrac, sebelah barat Belgrade atau Boegrad, Serbia, Yugoslavia. Milosevic adalah seorang sarjana hukum lulusan Universitas Belgrade. Ia terpilih menjadi pemimpin Liga Komunis Serbia tahun 1986 dan menjadi presiden Serbia pada tanggal 8 Mei 1989. Tim Narasi, *The Mass Killers of the Twentieth Century*, a.b. Febiola Reza Wijaya, *Pembunuh-pembunuh Masal Abad XX*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), hlm. 139-140. Lihat lampiran 11, hlm. 168.

<sup>13</sup> Walgito, *Kejatuhan Kekuasaan Rezim Milosevic*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), hlm. 36.

Keputusan dua republik tersebut memicu rivalitas yang semakin tinggi antara Kroasia dan Slovenia di satu pihak dengan Serbia dan Montenegro di pihak lain. Kosovo pun menjadi *corner-stone* yang memberikan andil sangat besar bagi terkoyak-koyaknya Yugoslavia.<sup>14</sup> Penyelesaian yang dilakukan Milosevic justru semakin menjauhkan harapan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Kosovo.

Permasalahan etnis yang muncul setelah tahun 1980 ini merupakan pertanda akan kurangnya rasa nasionalisme sebagai bangsa Yugoslavia dari masyarakatnya. Setiap etnis dari republik bagian Yugoslavia, telah lebih dahulu memiliki kesadaran etnis masing-masing dibandingkan kesadaran nasional sebagai bangsa Yugoslavia. Proporsi dari penduduk yang lebih mengidentifikasi diri sebagai bangsa Yugoslavia daripada identitas etnis masing-masing hanya sekitar 5.4 % dalam sensus tahun 1981.<sup>15</sup> Semua ini menandakan bahwa membangun bangsa yang melintas paham-paham sempit dan fanatik hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang sungguh-sungguh berwawasan nasional sehingga mampu menyatukan tujuan sebagai suatu bangsa yang utuh.

## **2. Krisis Ekonomi**

Krisis ekonomi yang menimpa Yugoslavia sekitar periode 1980-an, merupakan konsekuensi dari masa lalu Yugoslavia. Ketika Tito berkuasa, ia menerapkan sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi swakelola.

---

<sup>14</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 211.

<sup>15</sup> Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 35.

Perusahaan diberi wewenang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri. Organisasi-organisasi swakelola didirikan di kalangan petani dan buruh. Harga barang ditetapkan berdasarkan tolok ukur ekonomi, bukan berdasarkan ketetapan pusat. Subsidi sebagian dicabut. Republik-republik yang lebih makmur diwajibkan membantu republik yang lebih miskin.<sup>16</sup>

Awalnya, penerapan sistem ekonomi yang diciptakan sendiri oleh Tito ini memang cukup berhasil. Rakyat dibuai dengan segala kemakmuran yang bahkan tidak pernah dirasakan oleh rakyat di negara-negara komunis lain, tetapi segala sesuatu memang ada masanya. Setelah kenikmatan panjang yang diperoleh dari sistem *self-management socialism*, suatu hal yang kemudian terjadi adalah rakyat dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang begitu sulit. Tanpa disadari, Tito bukanlah mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan melainkan hanya sekedar menunda penderitaan rakyatnya.

Kaum proletariat sebagai penggerak dalam menciptakan negara komunis tidak lantas mendapatkan imbalan setimpal ketika negara komunis tersebut tengah mengalami kejayaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem dalam negara komunis yang mengharuskan alat produksi menjadi milik negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui permainan aparat birokrasi, kaum proletariat diperas untuk menjadi tenaga penggerak pada alat produksi yang telah dinasionalisasi. Kesejahteraan yang telah dijanjikan pemerintah menjadi tidak pernah dirasakan oleh kaum buruh.

Menghindari hal serupa terjadi di Yugoslavia, Tito mencoba menggunakan formula baru dalam perekonomian negaranya dengan lari dari sosialisme Rusia.

Alat produksi dimiliki secara langsung oleh kaum buruh secara kolektif. Mereka mengelola dan membagikan keuntungan di antara mereka sendiri.

---

<sup>16</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 203.



Yugoslavia, dengan demikian adalah negara komunis pertama yang melaksanakan ekonomi pasar, sebuah konsep ekonomi yang tumbuh subur di negara-negara kapitalis. Realisasi ekonomi pasar ini memberikan wajah lain dalam kehidupan masyarakat Yugoslavia.<sup>17</sup>

Perekonomian dalam sistem Sosialisme swakelola tidak jauh berbeda dengan sosialisme Rusia. Terutama dalam hal ketidakinginan adanya pengangguran dalam negara. Prinsip “semua harus kerja” menciptakan ekonomi yang tidak efisien. Setiap perusahaan terpaksa menampung buruh sebanyak mungkin, tanpa memperhitungkan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar upah para buruh. Lebih parah lagi buruh yang bekerja dalam sistem *self management socialism* merasa memiliki perusahaan dimana ia bekerja sehingga seringkali bekerja seenaknya sendiri. Kualitas pekerja yang rendah akan menciptakan produk yang rendah pula sehingga kurang laku di pasaran.

Besarnya biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sebanding dengan biaya yang *income*<sup>18</sup> dari setiap perusahaan. Kecilnya pendapatan perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk membayar upah buruh. Hal ini memaksa perusahaan mencari dana pinjaman dari luar untuk menutup kekurangan dana dari perusahaan. Setiap tahun dana pinjaman yang diperoleh dari luar negeri terus bertambah. Terhitung sejak tahun 1975, hutang luar negeri Yugoslavia mencapai AS\$5 milyar. Angka tersebut naik menjadi AS\$ 11,2 milyar pada tahun 1982. Hutang-hutang tersebut terus meningkat hingga mencapai AS\$ 21 milyar

---

<sup>17</sup> Tjipta Lesmana, *loc.cit.*

<sup>18</sup> *Income* adalah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia. 2008), hlm. 522.

pada tahun 1989.<sup>19</sup> Cepatnya pertambahan aliran dana pinjaman luar negeri membuat Yugoslavia harus menanggung hutang dalam jumlah yang sangat besar pasca kepemimpinan Tito.

Jumlah hutang yang semakin meluap akibat pengeluaran perusahaan lebih besar dari pada pendapatan menimbulkan volume uang yang beredar terus bertambah. Akibatnya, sebuah proses *inflasi*<sup>20</sup> tumbuh subur di Yugoslavia. Angka-angka *inflasi* yang dihadapi Yugoslavia telah mencapai angka 90% pada tahun 1986. Setahun kemudian *inflasi* naik menjadi 140% dan pada tahun 1988 *inflasi* naik lagi menjadi 250%. *Inflasi* tersebut masih mengalami kenaikan hingga mencapai 2.665% pada tahun 1989.<sup>21</sup> Sebuah kenaikan yang amat mengerikan dan ini meandakan bahwa perekonomian Yugoslavia dalam keadaan kritis.

Kondisi ekonomi Yugoslavia yang terus memburuk membuat pemerintah federal kewalahan dalam mengatasinya. Ketika beberapa pinjaman telah jatuh tempo pemerintah tidak sanggup melunasinya. Sementara itu, taraf hidup rakyat di beberapa republik semakin rendah. Para pegawai negeri tidak lagi menerima gaji sebagaimana mestinya. Jumlah pengangguran pun meningkat tajam akibat adanya pemberhentian pekerja secara besar-besaran yang dilakukan sejumlah perusahaan. Hal ini terpaksa dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak mampu lagi membayar gaji untuk para buruh.

---

<sup>19</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 219.

<sup>20</sup> *Inflasi* adalah Kemerostan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 534.

<sup>21</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 218.

Rakyat Yugoslavia yang tengah kesulitan menghadapi krisis ekonomi, harus merasakan kecewa dengan terbongkarnya ulah para pejabat yang melakukan korupsi. Skandal penggelapan dana terbesar terjadi di wilayah yang justru mayoritas masyarakatnya adalah umat Muslim yakni Bosnia-Herzegovina. Hamdija Pozderac yang menjabat sebagai wakil presiden Yugoslavia serta Fadil Hodza, salah satu anggota Dewan Kepresidenan Federal adalah dalang dari kasus korupsi *Agrokomerc*<sup>22</sup>. Keduanya beserta sejumlah pejabat lain yang terlibat dalam kasus tersebut kemudian diberhentikan dari jabatannya.

Kasus lain yang tak kalah mengundang perhatian masyarakat adalah skandal Neum<sup>23</sup>. Skandal ini juga melibatkan sejumlah pejabat penting Bosnia-Herzegovina antara lain Milanko Renovica seorang mantan ketua partai, Nikola Stajonoivic yang menjabat sebagai sekretaris partai, Mato Andric menjabat sebagai Presiden Bosnia-Herzegovina, dan Hvorje Istuk adalah ketua Aliansi Sosialis Yugoslavia cabang Bosnia-Herzegovina. Setelah kasus ini terkuak keempat pejabat tersebut dicopot dari posisinya masing-masing. Akibat dua kasus

---

<sup>22</sup> Kasus *Agrokomerc* merupakan kasus korupsi akibat otonomi republik bagian Yugoslavia dalam mengelola perusahaan di daerahnya. Skandal itu menyangkut penerbitan *promote-note* (nota yang dapat diuangkan) kosong senilai AS\$ 865 juta. Dana yang terhimpun ternyata sebagian besar dipergunakan untuk membangun proyek-proyek mercusuar yang saat sekali tidak ada hubungannya dengan aktivitas perusahaan. *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>23</sup> Skandal Neum adalah penyalahgunaan kredit berjumlah ratusan dolar. Kredit tersebut disediakan pemerintah untuk membantu program pengadaan perumahan bagi masyarakat tingkat bawah dengan suku bunga serta jangka waktu 20 tahun. Kredit tersebut ternyata dimanfaatkan sekitar 500 orang kenamaan untuk membangun vila-vila mewah di Neum, salah satu tempat peristirahatan kenamaan di pantai Adriatik. *Ibid.*, hlm. 221.

korupsi ini, negara menderita kerugian besar dan perekonomian Yugoslavia semakin mencemaskan.

Setiap pemerintahan yang mendapat giliran untuk memimpin federasi selalu mencanangkan perbaikan ekonomi sebagai program utamanya, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Kegagalan tersebut terjadi lantaran pemerintah tidak memiliki keberanian untuk mereformasi sistem perekonomian Yugoslavia secara radikal. Kegagalan partai komunis untuk mengatasi buruknya perekonomian memicu lahirnya tuntutan untuk demokratisasi, pluralisme, dan penghargaan pada hak asasi manusia. Partai komunis Yugoslavia kemudian mengalami perpecahan, terutama antara pusat dengan republik-republik bagian.

Situasi ekonomi yang kacau dimanfaatkan Kroasia dan Slovenia sebagai alasan untuk semakin memperjelas rivalitasnya dengan Serbia. Kroasia dan Slovenia terlihat paling menunjukkan ketidakuasannya terhadap kebijakan ekonomi Ante Markovic<sup>24</sup>. Sebagai republik dengan tingkat kekayaan lebih, keduanya merasa dirugikan ketika harus menutupi kekurangan-kekurangan finansial yang dialami republik lain. Kedua republik ini secara terang-terangan menyatakan penolakannya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sebagai akibatnya, kedua republik tersebut tak henti-hentinya terlibat perselisihan dengan Serbia dalam berbagai kepentingan. Jika sebelumnya konflik hanya sebatas perang mulut, maka sejak pertengahan tahun 1990 kontak fisik mulai terjadi.

---

<sup>24</sup> Ante Markovic adalah Perdana Menteri terakhir dari Federasi Yugoslavia yang menjabat pada periode 1989-1991. Dia telah memperkenalkan pasar pada kalangan masyarakat kelas bawah serta mereformasi politik Yugoslavia. <sup>24</sup> Laura Silber & Alan Little, *The Death Of Yugoslavia*, (London: BBC, 1995), hlm. 20.

Perselisihan antara Kroasia dan Slovenia dengan pemerintah federal akibat krisis ekonomi berujung pada tuntutan kelonggaran dalam pemerintahan oleh dua republik tersebut. Bagi Kroasia dan Slovenia tentu tidak menjadi masalah ketika harus membangun pemerintahan tanpa ada campur tangan pemerintahan federal. Bahkan keduanya merasa akan bernasib lebih baik jika terlepas dari federasi, meskipun hal itu tidak sepenuhnya benar. Kekhawatiran justru muncul pada pemerintah federal karena akan kehilangan cukup besar dari pendapatan yang semula diperoleh dari Kroasia dan Slovenia. Perselisihan antara Kroasia dan Slovenia dengan pemerintah pusat mengenai tuntutan status kemerdekaan dua republik tersebut semakin sulit diatasi. Prahara ini mengindikasikan, krisis politik akan timbul seiring terjadinya krisis ekonomi dalam suatu negara.

### **3. Krisis Kepemimpinan**

Federasi Komunis Yugoslavia didirikan atas kerja keras lima pendekar komunis. Mereka adalah Joseph Broz Tito dari Kroasia, Edward Kardelj dari Slovenia, Alexander Rankovic dari Serbia, Milovan Djilas dari Montenegro, dan Mosa Pijade seorang keturunan Yahudi.<sup>25</sup> Kelima pendekar komunis merupakan cerminan dari cita-cita Yugoslavia, yaitu mempersatukan seluruh bangsa Slavia Selatan dalam satu negara. Masa lalu Yugoslavia yang selalu diwarnai konflik antar etnis tidak lagi menjadi penghalang untuk merapatkan relasi antar bangsa-bangsa Slavia Selatan. Mereka, terutama Tito amat yakin bahwa Yugoslavia akan memiliki masa depan gemilang dalam kendali mereka.

---

<sup>25</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 201.

Sejak Tito menjadi presiden Yugoslavia, keempat pendekar komunis lainnya juga turut menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintah federal. Alexander Rankovic menjabat wakil presiden yang menangani urusan personeil partai dan polisi rahasia. Edward Kardelj adalah pemimpin Slovenia yang juga menjabat sebagai kepala departemen ideologi LKY. Sementara Milovan Djilas, sejak awal telah memiliki pemikiran yang cenderung berseberangan dengan Tito sehingga membuatnya dicopot dari keanggotaan partai. Mosa Pijade sendiri tidak terlalu banyak diketahui mengenai dirinya. Ia lebih banyak dikenal sebagai artis dan pelukis yang aktif dalam gerakan komunis pimpinan Tito.

Sebagai salah satu dari “pendekar komunis”, peran Tito dalam memajukan Yugoslavia memang paling menonjol. Tito berperan besar dalam mengusung perdamaian bagi Yugoslavia setelah Perang Dunia II. Kehadiran Tito sebagai tokoh utama dalam federasi tersebut telah menjadi nafas baru dalam pemerintahan Yugoslavia. Perdamaian senantiasa terpelihara dan luka akibat perang perlahan-lahan mulai sembuh. Tito juga berhasil menjaga keseimbangan perlakuan terhadap masing-masing etnis maupun republik bagian, sehingga selama kepemimpinan Tito tidak pernah terjadi kerusuhan dalam skala besar. Dapat dikatakan Yugoslavia berada pada puncak kejayaan selama diperintah oleh Tito.

Kejayaan yang telah dicapai Yugoslavia hendaknya dapat dipertahankan, dengan atau tanpa Tito sebagai pemimpin. Hal yang sudah seharusnya dilakukan adalah mempersiapkan generasi penerus Yugoslavia agar memiliki kecakapan dalam memerintah setara dengan Tito. Usaha tersebut pernah dilakukan terhadap empat pendekar komunis lainnya, namun dari keempat rekan Tito tersebut tak satu

pun yang berhasil dibina dan dipersiapkan sebagai pemimpin baru Yugoslavia. Berbagai alasan diutarakan untuk memberi kesan bahwa kegagalan dalam membentuk calon pemimpin baru Yugoslavia adalah lumrah.

Perselisihan mengenai bentuk sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan federal menjadi alasan yang kuat untuk memberhentikan Alexander Rankovic dari jabatannya pada pertengahan 1966. Sejak tahun 1960-an, Rankovic bersama dengan Kardelj tergabung dalam sebuah kelompok pendukung Tito. Rankovic merupakan pendukung Tito yang setia, sehingga ia diperkirakan akan menjadi pengganti Tito. Namun, hal itu tidak akan pernah terjadi lantaran ia tidak lagi sepaham dengan Kardelj. Adanya liberalisasi yang semakin merebak di Yugoslavia membuat Kardelj beralih haluan. Ia bergabung dengan kaum liberal dan menginginkan dijalankannya desentralisasi dalam pemerintahan. Sementara itu, Rankovic lebih menyukai Yugoslavia dengan sistem sentralisasi dengan Beograd sebagai pusatnya. Ternyata, Tito cenderung lebih memihak pada kaum liberal dan menyetujui desentralisasi. Kondisi ini membuat Rankovic dianggap berbahaya bagi eksistensi Tito, sehingga Rankovic terpaksa diberhentikan dan harapan untuk menjadikan Rankovic sebagai pengganti Tito pupus sudah.

Setelah terpisah dari Rankovic, Tito menggandeng Edward Kardelj untuk dijadikan sebagai penggantinya. Sangat disayangkan kardelj tidak memiliki umur yang lebih panjang. Harapan Tito untuk menjatuhkan tampuk kepemimpinan kepada Kardelj tidak pernah terwujud. Kardelj meninggal pada bulan Februari 1979. Muncul sebuah anggapan bahwa meninggalnya Kardelj tersebut erat kaitannya dengan perselisihan mengenai sentralisasi dan desentralisasi yang

pernah terjadi dengan Rankovic. Rankovic merasa cemburu karena ia kehilangan posisinya sebagai orang kepercayaan Tito, kemudian terbesit hasrat buruk dalam benak Rankovic terhadap Kardelj untuk melampiaskan amarahnya.

Lain lagi dengan cerita dari Milovan Djilas, seorang kritikus politik. Ia mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada rekan-rekan Tito yang lain. Djilas memberikan kecaman keras terhadap rezim komunis pimpinan Tito. Kecaman tersebut dilontarkan karena kekuasaan Tito memiliki kecenderungan ke arah totaliter. Berbagai kritikan pedas yang Djilas berikan terhadap pemerintahan Tito, membuatnya menerima sanksi yang cukup berat. Ia dikeluarkan dari keanggotaan partai kemudian dijebloskan ke penjara. Lagi-lagi Tito gagal mendapatkan generasi penerusnya.

Persahabatan Tito dengan Mosa Pijade berawal dari balik jeruji besi. Keduanya bersahabat baik sewaktu berada dalam penjara yang sama. Usia yang lebih tua tidak menghalangi Pijade untuk menjadi salah satu kandidat pengganti Tito. Meskipun awalnya Pijade adalah seorang artis dan aktivis dalam gerakan komunis pimpinan Tito, namun perlahan-lahan ia meniti karir di dunia politik. Pijade diberi kesempatan untuk menjadi anggota politbiro setelah Tito menjadi presiden. Pijade menentang politik reformasi yang dijalankan Tito, sehingga persahabatan keduanya berakhir begitu pula dengan pencalonan Pijade sebagai salah satu kandidat pengganti Tito.

Tak satupun dari rekan seperjuangan Tito yang berhasil dibina dan dipersiapkan menjadi penggantinya untuk menjaga stabilitas Yugoslavia. Tampaknya kegagalan Tito untuk mendapatkan penggantinya bukan disebabkan



ketidakmampuannya dalam membentuk kader-kader baru Yugoslavia, namun lebih berasal dari faktor ketidakseriusan Tito untuk mempersiapkan pemimpin Yugoslavia di masa yang akan datang. Tampaknya Tito tidak benar-benar ingin mendapatkan penggantinya lantaran ia sudah terlalu nyaman duduk di kursi yang empuk. Tentu Tito tidak akan merelakan begitu saja kenyamanan yang telah ia perjuangkan dengan susah payah untuk mendapatkannya. Jika Tito lebih cepat mendapatkan penggantinya, maka mau tidak mau ia harus segera melepaskan jabatannya sebagai presiden.

Terlepas dari ketidakseriusan Tito, pemimpin negara komunis umumnya memiliki sifat yang hampir sama yakni memerintah dengan tangan besi. Begitu juga dengan Tito, Yugoslavia pada masa pemerintahan Tito terlihat stabil tanpa ada kekerasan yang berarti. Segala bentuk gejala anarki mampu dicegah dengan kekuatan tangan besi Tito. Setiap pihak yang dianggap mengancam stabilitas dan integrasi Yugoslavia, tanpa ragu Tito segera menyingkirkannya. Sikap tegas Tito tersebut di satu sisi memang telah berhasil menegakkan negara komunis yang kokoh, namun sikap Tito yang demikian juga telah membenamkan potensi-potensi unggul bagi calon pemimpin baru Yugoslavia. Hingga menjelang Tito meninggal tak ada satu pun pemimpin baru yang dapat diterima seluruh rakyat Yugoslavia.

Yugoslavia ternyata tidak menemukan pengganti Tito. Kebijakan yang diambil untuk mendapatkan pemimpin bagi federasi ini adalah menggunakan sistem kepemimpinan kolektif yang disebut Dewan Kepresidenan Federal (DKF). Sistem ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari dominasi salah satu republik di dalam federasi. Masing-masing republik bagian beserta dua provinsi

otonom mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi ketua DKF atau presiden Yugoslavia. Jabatan presiden diberikan secara rotasi setiap tahun dari perwakilan republik dan provinsi otonom untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan.

Selama beberapa tahun pertama, pelaksanaan pemerintahan kolektif tidak ada masalah serius selain masalah perekonomian nasional. Keadaan mulai berubah semenjak kemunculan Milosevic. Jabatan presiden yang telah diperoleh, akan menjadi jalan bagi Milosevic dalam meraih ambisi-ambisi politik berikutnya yaitu menjadi orang terkuat di Yugoslavia sepeninggal Tito. Milosevic juga bermaksud untuk membangun kembali kebesaran tradisional, kehormatan, dan keagungan etnik Serbia dengan menggagaskan perwujudan Serbia Raya (*Greater Serbia*). Sejak itu eksistensi Serbia dalam pemerintahan federal semakin dominan.

Dominasi Serbia dalam pemerintahan pusat berdampak buruk pada proses perputaran ketua DKF. Ketua DKF yang ketika itu diduduki oleh Borisav Jovic, wakil dari Serbia telah habis masa jabatannya dan yang mendapat giliran untuk menggantikan posisi Jovic adalah Stipe Mesic, wakil dari Kroasia. Pencalonan Mesic sebagai ketua DKF selanjutnya, ternyata mendapat penolakan dari pihak Serbia.<sup>26</sup> Penolakan Serbia atas Mesic ini adalah salah satu bentuk campur tangan Milosevic yang ingin mengendalikan seluruh Yugoslavia. Mesic dituduh sebagai tokoh nasionalis yang dapat mengancam integrasi Yugoslavia. Sementara itu, pihak Kroasia menganggap tindakan Serbia tersebut yang justru akan mengantarkan Yugoslavia menuju disintegrasi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

Benar saja, penolakan Serbia atas Mesic tersebut menimbulkan perdebatan yang tak berujung antara Kroasia dengan Serbia. Perselisihan antara keduanya kembali memanas dan bahkan akan terus meninggi. Pihak Kroasia tidak terima dengan perlakuan Serbia karena berdasarkan peraturan pemerintahan federal, ketua DKF harus diganti tiap tahunnya. Serbia sendiri tetap kukuh dengan pendiriannya untuk menolak Mesic dan menginginkan jabatan ketua DKF Yugoslavia tetap dipegang oleh Borisav Jovic, wakil dari republiknya. Menjelang hari dimana Jovic harus meletakkan jabatannya, pemerintah tidak juga berhasil mencapai konsensus karena keduanya tetap bersikeras pada keinginannya masing-masing. Kroasia semakin geram mengetahui hal ini dan mengancam akan mengambil tindakan yang lebih jauh jika Serbia tetap tidak bersedia menerima pencalonan Mesic.

#### **4. Pengaruh Negara-negara Eropa Timur**

Berdirinya Yugoslavia dengan berdirinya Republik Komunis Uni Soviet merupakan suatu perbandingan yang unik. Cikal bakal Yugoslavia telah berdiri pada tahun 1918 dengan nama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Berbagai peristiwa telah mengubah kerajaan tersebut hingga menjadi federasi komunis yang dikenal sebagai negara Yugoslavia. Uni Soviet atau Rusia sendiri semula adalah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Rusia. Revolusi Bolshevik yang terjadi pada Oktober 1917 telah mereformasi kerajaan tersebut menjadi Uni Socialis Soviet Republic (USSR).

Baik Uni Soviet maupun Yugoslavia juga mengalami keruntuhan dalam waktu yang hampir sama. Uni Soviet runtuh pada 31 Desember 1990 dan pada tahun-tahun berikutnya satu per satu republik bagian Yugoslavia memisahkan diri dari federasi Yugoslavia. Bubarnya Uni Soviet merupakan dampak dari adanya pembaruan politik yang dilakukan presiden Mikhael Gorbachev. Gebrakan pembaruan Gorbachev melalui Glasnost (keterbukaan), Perestroika (restrukturisasi), dan Demokratizatsiya (demokratisasi) telah membuka jalan reformasi sistem politik di Uni Soviet dan negara-negara satelitnya yang lambat laun menjalar ke Yugoslavia.<sup>27</sup>

Gorbachev telah mewarisi kebobrokan dari para pendahulunya, sehingga ia mencoba melancarkan pembaruan. Sebenarnya, upaya pembaruan juga telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Uni Soviet sebelum Gorbachev. Seperti para pendahulunya, Gorbachev melakukan pembaruan yang dimaksudkan untuk menyetatkan dan merevitalisasi ideologi komunis dengan harapan agar masyarakat lebih berinisiatif, kreatif, dan bekerja keras guna mengejar ketertinggalannya yang makin jauh dari sejumlah negara lain, terutama negara-negara barat.<sup>28</sup> Realitas yang berkembang memperlihatkan bahwa gerakan pembaruan itu justru menyalakan api krisis ideologi yang melumpuhkan komunisme sebagai ideologi resmi negara-negara di Eropa Timur. Setelah memasuki jangka waktu yang cukup panjang, glasnost dan perestroika

---

<sup>27</sup> Soelistyati Ismail Ghani, *Disintegrasi di Yugoslavia dan Faktor Penyebabnya*, (Yogyakarta: UGM, 1993), hlm. 26.

<sup>28</sup> J. Soedjati Djiwandono, "Pengaruh Pembaruan Gorbachev" dalam Dwi Susanto & Zainnudin Djafar, *Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 42-43.

menghasilkan perubahan nyata dalam bidang politik yang membawa pengaruh dalam bidang ekonomi. Pembaruan di negara-negara Eropa Timur anggota Pakta Warsawa telah berkembang menuju terbongkarnya sistem monopoli partai komunis yang hendak menerapkan sistem multi partai sebagai gantinya. Partai-partai oposisi mulai tumbuh, bahkan mampu mengungguli partai komunis. Akibatnya, partai komunis melemah dan akhirnya runtuh di seluruh Eropa Timur.

Konsep Glasnost juga telah menyadarkan negara-negara Eropa Timur bahwa pemerintahan yang tersentralisasi secara ketat dan tertutup yang didasarkan pada ideologi komunis telah melemahkan kreatifitas bangsanya sehingga tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Kesadaran tersebut segera diikuti tindakan dengan melepaskan status sebagai satelit Uni Soviet dan memilih untuk menjadi negara sendiri. Melihat kecenderungan di Uni Soviet, republik-republik bagian Yugoslavia memutuskan untuk mengambil tindakan serupa. Republik-republik bagian Yugoslavia memilih untuk melepaskan diri dari federasi Yugoslavia sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang sentralistik. Mereka merasa akan jauh lebih berkembang ketika mereka dengan bebas mengatur pemerintahan mereka sendiri tanpa mengikuti prinsip komunisme.

Prinsip-prinsip dasar komunisme memang banyak mengandung unsur-unsur kekeliruan terutama mengenai prinsip pemerataan. Gaji profesor tidak jauh berbeda dengan gaji para buruh, gaji wartawan tidak jauh beda dengan gaji duta besar.<sup>29</sup> Penentuan gaji yang diterima para pekerja tersebut didasarkan pada prinsip pemerataan. Padahal, besar kecilnya gaji semestinya diukur dari prestasi

---

<sup>29</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 273.

dan produktivitas seseorang yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Ketentuan tersebut tidak dapat diterima oleh komunis dengan alasan perbedaan gaji rakyat akan memunculkan kaum borjuis yang merupakan musuh utama kaum ploreariat. Meskipun demikian yang mengherankan adalah beberapa gelintir orang pemegang puncak kekuasaan umumnya hidup secara eksklusif di tengah kehidupan rakyat yang serba terbatas. Selain itu, prinsip komunisme yang menginginkan pemerataan telah menentang keniscayaan sosial yang ada. Tatanan masyarakat manapun selalu mencakup kelas-kelas sosial dari yang tinggi hingga yang rendah. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar, namun ketika komunis menginginkan pemerataan ini berarti telah terjadi pemaksaan oleh para birokrat demi mewujudkan suatu negara yang bersih dari pengangguran.

Fenomena birokrasi yang berkuasa secara absolut nyatanya marak terjadi pada negara komunis. Kekuasaan absolut dalam negara komunis sering disebut sebagai diktator proletariat. Umumnya pemerintahan semacam ini tak pernah disukai rakyat. Kebebasan rakyat seakan dikebiri. Tak ada rakyat yang berani menentang pemerintah atau jika itu terjadi berarti ia harus siap kehilangan nyawa. Pemerintahan yang berbentuk absolut tidak dapat diterima rakyat karena mengingkari kodrat manusia yang mengenal pluralisme dalam segala aspek kehidupannya. Alam demokrasi yang sesungguhnya dapat menjamin kebebasan setiap warga negaranya. Sementara dalam pemerintahan komunis warga selalu dihantui rasa takut dengan adanya teror yang dilakukan oleh polisi rahasia yang merupakan senjata utama pemerintah komunis. Diktator proletariat dan polisi

rahasia merupakan dua sejoli yang tak terpisahkan.<sup>30</sup> Jika tidak ditopang oleh kekuatan teror polisi rahasia, maka pemerintahan diktator proletariat pasti telah hancur sejak lama.

Uni Soviet tampaknya tidak belajar dari masa lalunya. Berdirinya Uni Soviet sejatinya berawal dari ungkapan protes terhadap Pemerintahan Tsar Rusia yang memerintah secara absolut. Ketsaran Rusia yang telah ada selama beratus-ratus tahun mengalami keruntuhan akibat tidak lagi mendapat simpati dari rakyat. Rakyat Rusia pada masa itu tidak pernah merasakan kesejahteraan, bertolak belakang dari kehidupan Tsar yang serba mewah. Tentu rakyat tidak mau terus-terusan tertindas, maka suara protes bergerak perlahan-lahan hingga berhasil menggulingkan pemerintahan Tsar. Tanpa disadari hal serupa juga dialami rezim komunis Uni Soviet. Pemerintah komunis yang totaliter membuat rakyat menderita, sehingga dengan adanya konsep glasnost memberikan kesempatan bagi rakyat di negara satelit Uni Soviet untuk melepaskan diri. Rezim komunis Uni Soviet pun kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.

Runtuhnya Uni Soviet menandakan bahwa Perang Dingin telah berakhir. Amerika tidak perlu lagi menghadapi ancaman komunis yang merupakan musuh utama Amerika. Pada era Perang Dingin, Amerika memanfaatkan keberadaan Yugoslavia sebagai negara tetangga Uni Soviet sebagai daerah penengah dalam pertikaian antara Amerika dengan Uni Soviet. Yugoslavia merupakan negara komunis yang tidak terlibat dalam Pakta Warsawa. Yugoslavia memutuskan untuk bersikap netral dan menyatakan diri sebagai negara non-blok terkait perselisihan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 268.

antara Blok Barat dan Blok Timur. Posisinya yang netral, membuat Amerika memiliki banyak kepentingan di Yugoslavia selama perang dingin. Hal ini membuat Yugoslavia memperoleh cukup banyak keuntungan dengan adanya berbagai bantuan yang diperoleh dari kerjasamanya dengan Amerika. Semenjak Uni Soviet runtuh, Amerika tidak lagi memiliki kepentingan di Yugoslavia. Berbagai bantuan, terutama dalam bidang ekonomi tidak lagi diperoleh. akibatnya, Yugoslavia mengalami kesulitan ekonomi yang menjadi salah satu pemicu ambuknya negara ini.

Negara-negara komunis di eropa Timur umumnya memiliki pola pikir yang sama dalam hal merebut atau memenangkan kekuasaan. Pola umum tersebut ternyata juga berlaku untuk keruntuhan rezim komunis di Eropa Timur. Konsep glasnost yang bertolak belakang dengan prinsip utama komunis telah membuka jalan bagi masuknya perkembangan dan informasi dari luar. Bangsa-bangsa Eropa Timur mulai memahami bahwa ideologi komunis adalah ideologi yang rapuh dan tidak mampu memberi kepuasan. Hal ini memicu terjadinya krisis umum komunisme. Krisis umum komunisme ini ditandai dengan terus-menerus membelotnya negara-negara baru dari model yang dipengeruhi oleh Uni Soviet, melemahnya posisi negara-negara tersebut dalam persaingan ekonomi dengan demokrasi-demokrasi usaha bebas yang telah maju, terjadinya monopoli partai, dan disintegrasi blok Soviet. Secara kumulatif, faktor-faktor operasional, institusional, dan filosofis ini memberikan sumbangan kebijakan-kebijakan yang akhirnya tidak hanya mengakibatkan krisis umum komunisme, tetapi juga



menyebabkan tumbuhnya ketidakastian terhadap hari depannya.<sup>31</sup> Ketidakpastian yang telah membawa kehancuran Yugoslavia hingga namanya pun tak ada lagi.

## **B. Konstelasi Etnis Yugoslavia**

Yugoslavia merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam etnis yang merupakan bagian dari rumpun bangsa Slavia Selatan. Lima etnis terbesar dari rumpun Slavia Selatan yaitu Serbia, Kroasia, Slovenia, Macedonia, dan Montenegro. Proporsi dari masing-masing etnis yang mendiami Yugoslavia adalah Serbia (36,3 %), Kroasia (19,7%), Bosnia (8,9 %), Slovenia (7,8 %), Albania (7,8 %), Macedonia (6,0 %), dan Montenegro (2,5 %).<sup>32</sup> Setiap etnis menempati wilayah yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh masing-masing etnis tersebut.

Perkembangan masing-masing etnis Yugoslavia bermula dari migrasi yang dilakukan oleh bangsa Slavia. Masyarakat Slavia terbentuk sekitar 2000 tahun yang lalu di kawasan sebelah selatan Laut Baltik. Daerah asal nenek moyang bangsa Slavia, menurut data arkeologi terletak di sebelah timur Jerman yakni dari Sungai Oder membentang ke timur hingga Pegunungan Carpathian.<sup>33</sup> Migrasi

---

<sup>31</sup> Brzezinski, Zbigniew, *The Grand Failure : The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century*, a. b. Tjun Surjaman, *Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm. 219.

<sup>32</sup> Soelistyati Ismail Ghani, *op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>33</sup> A. Fahrurodji, *Rusia Baru menuju Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 7.

tersebut terjadi secara bertahap. Salah satu tahap dari migrasi bangsa Slavia adalah menuju ke arah selatan. Gerak perpindahan ke selatan inilah yang kemudian menciptakan sebutan Slavia Selatan atau Yugoslavia.<sup>34</sup> Selain Slavia Selatan ada pula sebutan Slavia Timur dan Slavia Barat. Bangsa Slavia Timur merupakan bangsa Slavia yang bermigrasi menuju Lembah Dniepr tepi Laut Hitam dan sekitar Danau Ilmen yang menurunkan bangsa Rusia. Sementara Slavia Barat adalah bangsa Slavia yang tetap menghuni wilayah leluhur mereka dan menurunkan bangsa Polandia.

Bangsa Slavia yang bermigrasi ke selatan terpisah-pisah dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok tersebut menghuni wilayah yang dibatasi oleh pegunungan yang terisolasi satu sama lain. Persebaran yang terjadi diikuti asimilasi kebudayaan yang dibawa bangsa Slavia dengan kebudayaan setempat, sehingga masing-masing kelompok bangsa Slavia Selatan memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Timbullah sebuah diversitas kebudayaan etnis dan bahasa antar bangsa Slavia Selatan yang menurunkan beberapa suku bangsa antara lain Serbs, Khrovats, Slovens, dan Bolgars.<sup>35</sup> Masing-masing membentuk satu sistem kenegaraan di bawah seorang pemimpin perang. Itulah sebabnya etnis-etnis tersebut mendiami wilayah yang secara geografis terpencar-pencar dan mengalami persebaran.

Etnis Serbia yang merupakan kelompok terbesar, misalnya, sekitar 55 % mendiami republik Serbia, 15 % di Bosnia-Herzegovina, 8 % di Kroasia, 13 % di Vojvodina, dan sisanya terpencar di wilayah-wilayah

---

<sup>34</sup> Soelistyati Ismail Ghani, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>35</sup> A. Fahrurodji, *op.cit.*, hlm. 8.

lain. Sementara itu sekitar 77 % dari etnis Kroasia tinggal di Republik Kroasia, 17 % tinggal di Bosnia, 2,5 % tinggal di Kosovo, dan sisanya tersebar di wilayah lain. Pemencaran etnis tersebut juga berlaku bagi etnis-etnis lain seperti Bosnia, Slovenia, Macedonia, Montenegro, Albania, dan Hungaria. Kemajemukan etnis tersebut juga dikombinasi dengan kemajemukan di bidang agama.<sup>36</sup>

Terdapat lebih dari 30 kelompok agama di Yugoslavia dengan kebebasan beragama dijamin oleh Undang-undang. Berdasarkan sensus tahun 1990 di Yugoslavia agama Kristen Ortodoks mencapai 34,6 %, Katolik Roma sebanyak 26 %, Kristen Kripto 11,3 %, Islam sebanyak 10,4 %, dan agama-agama lain 17,7 %.<sup>37</sup> Agama Kristen Ortodoks kebanyakan dianut oleh etnis Serbia, Makedonia, dan Montenegro. Sementara penduduk Kroasia dan Slovenia menganut agama Katolik Roma. Umat Islam umumnya berada di kawasan bagian selatan seperti Bosnia dan Kosovo yang pernah menjadi jajahan Turki Usmani.

Etnis Muslim Bosnia lebih memandang diri mereka sebagai masyarakat sekuler Eropa daripada sebagai seorang Muslim. Etnis Muslim Bosnia sebenarnya merupakan keturunan etnis Kroasia dan Serbia yang diislamkan oleh Turki. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan orang Bosnia cenderung memilih menjadi Muslim. Sekelompok pemeluk Katolik Bosnia dianggap sesat oleh gereja yang dikuasai Serbia dan Kroasia.<sup>38</sup> Para penganut Gereja Bosnia ini

---

<sup>36</sup> Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 31. Lihat lampiran 1, hlm. 158.

<sup>37</sup> Soelistyati Islamil Ghani, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>38</sup> Agus Surata dan Tuhana Taufik A., *Runtuhnya Negara Bangsa*, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2002), hlm. 158.

dikenal dengan sebutan Bogomil<sup>39</sup>. Para penganut sekte Bogomil sering dianiaya oleh para penganut Katolik Roma maupun Kristen Ortodoks karena menolak konsep Trinitas. Keimanan mereka sekilas lebih dekat dengan Islam, sehingga ketika Islam masuk Bosnia mereka dengan mudah menerima Islam.

Bosnia sering mendapat julukan sebagai “miniatur Yugoslavia”<sup>40</sup>, karena Bosnia merupakan republik yang paling multi etnis dan multi religius seperti halnya Yugoslavia. Pemerintahan yang dibentuk pun pemerintahan yang multi etnis. Islam merupakan agama paling dominan di Bosnia-Herzegovina, namun bukanlah satu-satunya agama yang diakui di Bosnia. Etnis Muslim adalah kaum paling terpelajar di Bosnia. Mereka menempati area perkotaan, sementara etnis Serbia Bosnia bekerja sebagai petani dan tuan tanah yang lebih banyak tinggal di desa. Dominasi umat Islam di Bosnia membuat sebagian besar sektor perekonomian negara ini dikuasai oleh Muslim. Sementara etnis Serbia Bosnia mendominasi kepolisian dan militer. Muslim Bosnia tidaklah seperti orang-orang Timur Tengah yang identik dengan pakaian tertutup. **Wanita Muslim Bosnia tidak**

---

<sup>39</sup> Bogomil berasal dari dua kata *Bog* yang artinya Tuhan dan *mili* yang artinya penyayang. Secara istilah Bogomil berarti sebuah gereja yang menyifatkan Tuhan yang diimani adalah sangat penyayang. T. Taufiqulhadi, *Menembus Sarajevo: Kesaksian pembersihan Etnik di Bosnia*, (Jakarta: Puspa Swara, 1994), hlm. 138.

<sup>40</sup> Erich Weingartner, “WCC/Cimade Mission to Serbian territories of Bosnia-Herzegovina Report”, *The Tregedi of Bosnia: Confronting the New World Disorder*, (Swiss: Unit on Justice, Peace, and Creation World Council of Churches, 1994), hlm. 24.

menggunakan cadar atau jilbab, sementara kaum pria hampir tidak ada yang menggunakan atribut yang menunjukkan identitas Islam.<sup>41</sup>

Sebagai salah satu republik bagian Yugoslavia, Bosnia ingin menunjukkan bahwa bermacam-macam etnis dan agama yang ada dapat hidup berdampingan dengan rukun. Para pemimpinnya pun menyadari adanya mozaik ini, sehingga semua unsur selalu berusaha untuk dimasukkan ke dalam susunan pemerintahan. Usaha tersebut diperkuat dengan menetapkan konstitusi federal baru yaitu konstitusi 1974.

Konstitusi 1974 ini menegaskan kembali ketentuan tentang kesamaan perlakuan terhadap etnis-etnis yang ada. Konstitusi ini juga menambah status dan hak-hak yang legal bagi republik. Suatu bentuk peningkatan desentralisasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada dua propinsi otonom, Vojvodina dan Kosovo.<sup>42</sup>

Kekuasaan Tito sebagai pemimpin federasi Yugoslavia berhasil mempersatukan seluruh etnis dan agama di Yugoslavia melalui slogan *Brotherhood and Unity*. Seluruh komponen kebudayaan yang dihasilkan oleh masing-masing etnis dikembangkan menjadi kebudayaan nasional tanpa mematikan kebudayaan lokal etnis tersebut. Kebudayaan lokal Yugoslavia antara lain yaitu kebudayaan Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Modernisasi tetap berlangsung di negara ini, namun kebanyakan kota besar maupun kecil masih mempertahankan gaya arsitektur asli. Gaya arsitektur Albania terlihat begitu kental di sebelah barat laut. Gaya Hongaria begitu melekat di bagian utara

---

<sup>41</sup> T. Taufiqulhadi, *op.cit.*, hlm. 50.

<sup>42</sup> Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 33.

serta arsitektur Turki terlihat di wilayah selatan. Tak ketinggalan pula gaya arsitektur venesia yang terhampar di wilayah semenanjung pantai.

Setiap republik mengembangkan potensi kebudayaan lokal masing-masing dan menggunakan bahasa sesuai dengan kebudayaan mereka. Terdapat begitu banyak ragam bahasa di Yugoslavia. Bahasa resmi yang diakui ada tiga yaitu bahasa Slovenia, Serbo-Kroasia, dan Makedonia. Karya sastra Yugoslavia memiliki ciri khas yang sangat kuat, namun pengaruh sastra Rusia juga cukup kuat. Umumnya masing-masing etnis juga menggunakan alfabet yang berlainan. Kroasia menggunakan huruf Romawi sebagai huruf nasional, Serbia menggunakan huruf Cyrillic, dan Bosnia menggunakan huruf Latin.<sup>43</sup>

Penduduk di seluruh republik bagian Yugoslavia masih menempati area pedesaan. Baru sekitar 45,6 % dari jumlah penduduk yang tinggal di kota, baik kota besar maupun kota kecil. Banyaknya penduduk yang masih tinggal di area pedesaan yang medannya sulit dijangkau membuat penduduk Yugoslavia belum terbebas dari buta huruf. Sekitar 10 % dari jumlah penduduk Yugoslavia masih belum mengenal baca tulis. Pemerintah sendiri telah menerapkan program wajib belajar bagi anak-anak yang berusia 6 hingga 15 tahun. Bahkan pemerintah telah membangun sekolah-sekolah khusus untuk minoritas tertentu seperti etnis Albania, Hongaria, Bulgaria, Ceko, Slowak, Italia, Rumania, dan Turki.<sup>44</sup>

Keragaman etnis bangsa Slavia Selatan berhasil diarahkan untuk menjalin persatuan dalam federasi Yugoslavia, meskipun masa lalu antar etnis Yugoslavia

---

<sup>43</sup> Agus Surata & Tuhana Taufiq A., *op.cit.*, hlm. 157.

<sup>44</sup> Soelistyati Islamil Ghani, *op.cit.*, hlm. 15.

selalu diwarnai perang. Tekad untuk bersatu tersebut mampu diwujudkan dengan bersama-sama membangun sebuah negara federasi yang mampu dipertahankan selama beberapa dekade. Hanya saja, darah perang yang telah mendarah daging sepertinya memang tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun. Kepergian Tito, sebagai pemimpin tunggal federasi tersebut segera diikuti dengan hancurnya persatuan antar etnis Yugoslavia. Permusuhan antara Serbia dan Kroasia kembali memanas, bahkan telah memicu persoalan-persoalan etnis lain. Semua permasalahan etnis yang tak terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hancurnya federasi komunis Yugoslavia.

### **C. Proklamasi Kemerdekaan Bosnia**

Yugoslavia semakin kesulitan menemukan jalan keluar untuk semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Satu masalah belum terselesaikan dengan tuntas, masalah lain muncul terus menerus hingga semakin kompleks. Tingginya kompleksitas persoalan yang melanda Yugoslavia, memudahkan tersulutnya persoalan baru akibat adanya persinggungan antara hal-hal sensitif yang ada dengan persoalan-persoalan induk. Pimpinan pemerintah federal rupanya tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Tidak adanya figur pengganti Tito mengakibatkan Yugoslavia kehilangan pemimpin yang mampu mengutamakan kepentingan federal di atas kepentingan republik bagian. Masing-masing republik semakin berani memperlihatkan *clash* yang nyata dengan mengutamakan keegoisan etnis masing-masing.

Presiden Slovenia, Janez Stanovnik, mengakui bahwa pertikaian republiknya dengan Serbia disebabkan oleh kejadian-kejadian di Kosovo serta krisis ekonomi yang berkepanjangan.<sup>45</sup> Mengenai masalah Kosovo, baik Kroasia maupun Slovenia menuduh Serbia telah menindas gerakan separatisme Albania di Kososvo yang telah memakan korban cukup banyak. Slovenia lantas mengambil tindakan dengan menarik kembali kepolisian federal dari unit Slovenia yang diterjunkan di Kosovo. Sementara pihak Serbia menganggap tindakan Slovenia tersebut merupakan bentuk dukungan secara tidak langsung terhadap perjuangan separatisme Albania di Kosovo. Permusuhan antar etnis terutama antara Serbia dengan Kroasia dan Slovenia yang kembali memuncak akibat kasus Kosovo ini berdampak pada krisis ekonomi yang melanda Yugoslavia. Krisis ekonomi Yugoslavia sebenarnya hampir dapat dijinakkan selama dipegang oleh Ante Markovic. Sayangnya, merebaknya konflik antar etnis menggagalkan upaya Markovic memperbaiki perekonomian Yugoslavia. Konflik etnis tampaknya telah menimbulkan perang ekonomi antar republik.

Kegagalan dalam mengatasi permasalahan ekonomi serta konflik etnis membuat pemerintah komunis dipandang sebelah mata oleh rakyat. Dominasi partai komunis dalam segala ruang kehidupan telah memangkas kepentingan negara bagian dan lebih mengutamakan kepentingan pusat, akibatnya rakyat semakin tidak percaya kemampuan partai komunis. Jatuhnya kekuasaan komunis di Eropa Timur, membuat gerakan menolak model federasi *ala* Bolshevik di

---

<sup>45</sup> Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 212.



Yugoslavia kian mengeras.<sup>46</sup> Milosevic mencoba meredakan gejolak dari republik-republik dengan menyetujui sistem multi partai. Hasil pemilu multi partai yang dilaksanakan tahun 1990 menunjukkan kemenangan partai oposisi di republik Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia.<sup>47</sup> Partai komunis hanya memperoleh kemenangan di dua republik yaitu Serbia dan Montenegro. Kemenangan yang didapat partai komunis di Serbia telah mengantarkan Slobodan Milosevic menjadi presiden Serbia.

Sebagai seorang presiden, Milosevic memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan unifikasi Serbia dengan menghapus status otonomi propinsi Kosovo dan Vovodina. Hal ini berarti Milosevic hendak menciptakan sebuah Yugoslavia yang tersentralisasi. Slovenia dan Koasia jelas menentang keinginan Serbia untuk menerapkan kembali sistem *democratic centralism* (sentralisme demokratis) ini. Menurut Milosevic sistem tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengatasi krisis dalam negeri Yugoslavia, sedangkan Slovenia memandang strategi tersebut sebagai peluang Serbia untuk memperkuat dominasinya dalam federasi. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa partai komunis tengah mengalami perpecahan, yaitu antara kubu konservatif yang tetap menginginkan sentralisasi dan kubu reformis yang menginginkan pembaruan sistem dengan diterapkannya desentralisasi dalam pemerintahan.

Slovenia dan Kroasia mengupayakan suatu bentuk federasi Yugoslavia yang lebih longgar dan terdesentralisasi. Dua republik ini juga menentang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

<sup>47</sup> Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 38.

prakarsa Serbia untuk mengubah Konstitusi Federal tahun 1974. Jika usulan amandemen terhadap Konstitusi Federal 1974 tersebut berhasil diterapkan, maka dominasi Serbia dalam federasi akan semakin besar. Kali ini, usaha dua republik tersebut tidak hanya menentang dominasi Serbia terhadap Yugoslavia, namun bergerak lebih jauh dengan mengancam akan keluar dari federasi Yugoslavia jika Serbia menolak rencana restrukturisasi yang diajukan Slovenia dan Kroasia. Sementara itu, pemerintah Bosnia-Herzegovina dan Makedonia menampilkan sikap yang lebih moderat meskipun keduanya juga menentang upaya-upaya resentralisasi yang dipelopori Milosevic.

Tarik menarik antara sentralisasi (federasi) dan desentralisasi (konfederasi) Yugoslavia makin tak terhindarkan dan integritas Yugoslavia menjadi taruhannya. Beberapa negara Barat turut berusaha mempertahankan kesatuan Yugoslavia dengan menganjurkan Yugoslavia dalam bentuk federal yang dipimpin oleh Ante Markovic. Menurut negara-negara barat tersebut beranggapan bahwa Markovic yang moderat ini dapat meredam nasionalisme keras Milosevic dan kedua orang tersebut secara bersama-sama dapat menjaga Yugoslavia federal dengan hanya perubahan kecil. Sangat disayangkan, partai Markovic tidak memperoleh kemenangan dalam pemilu multi partai. Kekalahan Markovic semakin dalam setelah adanya tekanan dari Milosevic yang kukuh ingin mempertahankan Yugoslavia dalam bentuk federasi, meskipun keinginan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari Slovenia dan Kroasia.

Berkali-kali diselenggarakan perundingan untuk memutuskan bentuk baru negara Yugoslavia, namun tidak juga diperoleh hasil. Warga Kroasia dan Slovenia

yang frustrasi akibat tidak adanya kemajuan perundingan, memberi mandat kepada pemerintah republiknya untuk mempersiapkan kemerdekaan mereka. Sebenarnya Slovenia dan Kroasia masih bersedia menawarkan Yugoslavia dengan bentuk konfederasi<sup>48</sup>, namun tawaran tersebut ditolak menatah-mentah oleh Milosevic. Menurutnya bentuk federasi harus dipertahankan, karena hanya dengan federasi kepentingan orang-orang Slavia Selatan dapat disatukan. Yugoslavia tidak boleh menjadi konfederasi, karena bentuk negara ini sama juga akan membubarkan Yugoslavia. Milosevic mengancam akan meninjau kembali perbatasan wilayah Serbia jika dua republik tersebut benar-benar keluar dari federasi.

Krisis politik Yugoslavia mencapai titik kulminasi ketika mendekati tanggal pergantian ketua DKF Yugoslavia. Slovenia dengan Kroasia semakin yakin untuk melepaskan diri. Berbagai kegagalan yang dialami pemerintah untuk mencapai sebuah kesepakatan digunakan Slovenia dan Kroasia untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan terus mempersiapkan kemerdekaan. Tanggal 23 Desember 1990 proses disosiasi memasuki tahap baru yang lebih dalam ketika Slovenia menyelenggarakan plebisit.<sup>49</sup> Sekitar 85 % rakyat menyatakan setuju republiknya menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Beberapa waktu kemudian, Kroasia segera mengikuti Slovenia. Tanggal 19 Mei 1991, suasana yang semakin memanas membuat Kroasia juga menyelenggarakan referendum.

---

<sup>48</sup> Pemerintah konfederal mengkoordinir urusan pertahanan-keamanan dan perekonomian, selain urusan ini, kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada negara anggota masing-masing. Tjipta Lesmana, *op.cit.*, hlm. 235.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

Hasilnya hampir sama dengan Slovenia, lebih dari 90 % menginginkan pemisahan diri dari federasi.

Kecaman keras datang dari Serbia, pihak yang sebenarnya tidak lagi memiliki wewenang dalam pemerintahan karena jabatan presiden Yugoslavia tidak lagi dipegang oleh wakil dari negaranya. Sejak awal Serbia memang bersikeras ingin mempertahankan Yugoslavia dalam bentuk federasi. Reaksi bersenjata dilakukan setelah Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1991.<sup>50</sup> Segera setelah itu, Markovic memberikan wewenang penggunaan kekuatan terhadap Slovenia dalam upaya menyelamatkan negara federal. Tindakan ini tidak konstitusional, sebab sejak 15 Mei 1991 Yugoslavia tidak mempunyai presiden. Padahal hanya Presiden Yugoslavia yang berhak memerintah penggunaan Tentara Federal. Menghadapi permasalahan ini yang kemudian dilakukan Milosevic adalah mengangkat Dobrica Cosic sebagai ketua Dewan Presidium Yugoslavia dan Milan Panic sebagai perdana menteri Yugoslavia versi baru yang dipertahankan Serbia.<sup>51</sup>

Penyerangan tentara federal (JNA) terhadap Slovenia ternyata mengalami kekalahan. Persiapan yang kurang matang, mengakibatkan kekalahan berada di pihak tentara federal. Akibat kekalahan ini otoritas pemerintah federal semakin jatuh, terutama Markovic. Melihat kondisi tersebut, Markovic menyadari kemungkinan yang akan terjadi apabila kontak senjata meluas.

---

<sup>50</sup> Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>51</sup> BSU & LPS, Potret Berdarah dari Dalam, *Tempo*, No. 4 Tahun 1993, hlm. 62.

Oleh karena itu, ia kemudian berusaha menghentikan meluasnya perang ke Kroasia dengan seruan langsung kepada Milosevic. Dalam surat terbuka kepada presiden Serbia, Markovic meminta kepada Milosevic untuk menanggukkan perintah memobilisasi rakyat Serbia, yang dilakukan untuk melancarkan perang di Kroasia. Milosevic dan para jenderal Beograd membalas permintaan Markovic dengan usaha pembunuhan terhadapnya. Pesawat tempur Angkatan Udara menyerang Istana Presiden di Zagreb pada 7 Oktober 1991 ketika Markovic sedang mengadakan pertemuan dengan presiden Kroasia, Franjo Tudjman dan Stipe Mesic. Maksudnya jelas, yaitu membunuh ketiganya. Pada tanggal 24 Desember 1991 akhirnya Markovic mengundurkan diri sebagai perdana menteri Yugoslavia yang tidak ada lagi.<sup>52</sup>

Sebelumnya, bulan Juli 1991 pemerintah Republik Bosnia-Herzegovina menyetujui penarikan tentara federal ke wilayahnya setelah kekalahan di Slovenia. Lebih dari seratus ribu tentara federal dikombinasi dengan tentara ireguler Serbia yang dikenal dengan nama Chetnik, berkumpul di Bosnia Herzegovina. Rupanya Serbia telah mengalihkan sasarannya ke Kroasia.

Pada bulan Juli 1991 pasukan “federal” Yugoslavia dan pasukan-pasukan ireguler Serbia menyerang Kroasia ke berbagai wilayah dari berbagai front. Perang tujuh bulan yang berlangsung dari bulan Juli 1991 sampai dengan Januari 1992 telah mengakibatkan 6.574 orang terbunuh, 23.733 luka-luka, dan 13.788 orang hilang. Menurut data dari pemerintah Kroasia, perang tersebut telah menghancurkan 40 % kapasitas ekonomi Kroasia dan menyebabkan kerugian sebesar 13 milyar Dollar AS.<sup>53</sup>

Penyerangan Tentara Federal terhadap Kroasia bukan lagi sebagai upaya pencegahan disintegrasi. Tampaknya Milosevic telah menyadari keengganan Kroasia untuk tetap tinggal sebagai anggota federasi, sehingga upayanya kali ini berubah. Serbia hendak menganeksasi wilayah Kroasia yang dihuni etnis Serbia untuk disatukan ke dalam wilayah Serbia yang nantinya akan menjadi penerus Yugoslavia baru. Penduduk Kroasia yang beragam membuat pertempuran Kroasia

---

<sup>52</sup> T. Taufiqulhadi, *op.cit.*, hlm. 47.

<sup>53</sup> Syamsul Hadi, *loc.cit.*

lebih sulit dipadamkan. Pertempuran yang terjadi di Kroasia kebanyakan terpusat di daerah-daerah yang didominasi etnis Serbia, namun sekitarnya dihuni oleh mayoritas Kroasia atau sebaliknya. Selama perang berlangsung, Serbia telah berhasil menguasai sekitar seperempas dari wilayah Kroasia. Perang ini berhasil dipadamkan setelah adanya pengakuan kedaulatan oleh Masyarakat Eropa (ME) terhadap Slovenia dan Kroasia pada Desember 1991. Pengakuan tersebut merupakan hasil negosiasi Jerman dengan negara-negara anggota ME.

Belum tuntas kemelut antara Kroasia dengan Serbia, Bosnia-Herzegovina mengumumkan akan mengikuti jejak Slovenia dan Kroasia untuk melakukan referendum. Hal ini sejalan dengan aspirasi etnis Muslim dan etnis Kroasia di Bosnia yang menginginkan kemerdekaan bagi Bosnia-Herzegovina. Etnis Kroasia mendukung kemerdekaan Bosnia setelah melihat apa yang terjadi pada Slovenia dan Kroasia. Sebelumnya baik etnis Kroasia maupun etnis Serbia di Bosnia dengan tegas menentang rencana untuk mendirikan negara Bosnia yang terpisah dari federasi Yugoslavia. Selama perang kemerdekaan Slovenia dan Kroasia, pemerintah Bosnia sendiri lebih bersifat fleksibel. Artinya, Bosnia tidak keberatan jika harus tetap berada dalam federasi Yugoslavia, namun jika federasi tidak mampu dipertahankan maka Bosnia siap untuk menjadi negara merdeka.

Pemilu multi partai tahun 1990 menghasilkan koalisi tiga partai yang mewakili ketiga etnis terbesar di Bosnia. Hasil pemilu tersebut adalah *Moslem Party for Democratic Action* (SDA) memperoleh 38 % suara, *Serbian Democratic Party* (SDS) memperoleh 27 % suara, dan *Croatian Democratic Union* (HDZ)

memperoleh 15 % suara.<sup>54</sup> Berdasarkan perolehan suara tersebut SDA telah memenangkan pemilu. SDA didirikan oleh Alija Izetbegovic<sup>55</sup> pada bulan Mei 1990. Kemenangan yang diperoleh SDA merupakan suatu hal yang wajar mengingat SDA merupakan partai Muslim dan pasti akan dipilih oleh sebagian besar warga Bosnia yang juga merupakan pemeluk Islam.

Seiring dengan pengakuan kemerdekaan terhadap Kroasia dan Slovenia, komisi ME menyarankan pemerintah Bosnia-Herzegovina untuk mengadakan referendum sebagai prasyarat pengakuan kemerdekaan Bosnia. Mengantisipasi huru-hara yang mungkin terjadi, Tentara Federal menarik mundur pasukan ke Bosnia-Herzegovina atas persetujuan PBB. Pihak Muslim Bosnia dan Kroasia Bosnia dengan dukungan partai-partai oposisi menyelenggarakan referendum pada tanggal 1 Maret 1992. Surat suara dalam referendum berisi pertanyaan:

“Apakah Anda mendukung Bosnia-Herzegovina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sebuah negara dengan persamaan sebagai warga dan bangsa yang terdiri dari Muslim, Serbia, Kroasia dan lain-lain yang hidup didalamnya?”<sup>56</sup>

Sekitar 64 % atau dua per tiga dari warga Bosnia menjawab ‘ya’ dan menyetujui Bosnia-Herzegovina memisahkan diri dari federasi menjadi negara merdeka. Alija Izetbegovic diangkat sebagai presiden Republik Bosnia-Herzegovina dan menjadi presiden Muslim pertama di Eropa.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>55</sup> Alija Izetbegovic adalah pemimpin sekaligus penemu *Muslim Party for Democratic Action* (SDA) yang terpilih sebagai presiden Bosnia-Herzegovina yang pertama dalam pemilu multi partai 1990. Laura Silber & Allan Little, *op.cit.*, hlm. 18. Lihat lampiran 10, hlm. 167.

<sup>56</sup> Noel Malcolm, *op.cit.*, hlm. 231.